

## PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN (SUATU TINJAUAN HYPHOTHESIS KUZNETS)

EMI SUWARNI  
MARDALENA

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,  
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma,  
Jalan Jend. A.Yani No. 12 Seberan, Palembang, Indonesia

### ABSTRACT

*The impact of economic growth upon the poor in developing countries is complex and contentious. Does growth benefit in a society all, and how does it affect inequality and vulnerability? There is profound disagreement about relationship between growth and distribution in academic circles. A number of cross sectional studies verify the inverted-U hypothesis and illustrate that in low-income countries inequality is negatively and robustly correlated with growth. In contrast, several studies utilizing data on individual country across time cast doubt the validity of the inverted-U hypothesis. There has been a debate about links between growth, distribution and poverty.*

*Keywords: growth, inequality, poverty.*

### PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan pada awal tahun 1950-an bahwa pembangunan ekonomi hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GDP, baik secara keseluruhan maupun per kapita. Dengan pertumbuhan GDP ini diyakini dengan sendirinya menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi lain yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Prinsip tersebut dikenal dengan *trickle down effect*. Sedangkan pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan GDP semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2003).

Banyak kalangan peneliti menjadikan parameter pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kesejahteraan rakyat yang selanjutnya menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan melalui mekanisme *trickle down effect*. Berdasarkan teori makroekonomi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin banyaknya output nasional, dengan demikian akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran menurun serta kemiskinan pun menurun. Namun seringkali pertumbuhan ekonomi tersebut tidak secara serta-merta menurunkan tingkat kemiskinan.

Di Indonesia, pada awal pemerintahan orde baru para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi, sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusat di pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya pada

sektor-sektor tertentu saja, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan *trickle down effects*.

Didasarkan pada pemikiran tersebut, pada awal periode orde baru hingga akhir dekade 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintah orde baru lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai di Pulau Jawa, dengan alasan bahwa semua fasilitas yang dibutuhkan, seperti pelabuhan, jalan raya dan kereta api, telekomunikasi, kompleks industri, gedung-gedung pemerintahan/administrasi negara, kantor-kantor perbankan, dan infrastruktur pendukung lainnya lebih tersedia di Jawa (khususnya Jakarta dan sekitarnya) dibandingkan di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pembangunan pada saat itu juga hanya terpusat pada sector-sektor tertentu saja yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan nilai tambah bruto yang tinggi. Mereka percaya bahwa nantinya hasil pembangunan akan "menetes" ke sektor-sektor dan wilayah Indonesia lainnya.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa setelah empat dekade sejak Pelita I tahun 1969, ternyata efek menetes tersebut sangat kecil, atau proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akibat dari strategi tersebut dapat dilihat pada dekade 1980-an hingga krisis ekonomi 1997, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi, tetapi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan semakin besar dan jumlah orang miskin meningkat.

Kemiskinan merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicari solusinya bagi suatu Negara. Oleh karena itu menurunkan tingkat kemiskinan selalu menjadi tujuan para pembuat kebijakan di hampir setiap negara. Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diukur dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan meningkatnya pendapatan per kapita rakyat.

Pada tahun 2000 beberapa negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), termasuk Indonesia menandatangani Deklarasi Milenium yang menunjukkan komitmen bangsa-bangsa tersebut untuk mencapai delapan sasaran pembangunan milenium (*Millenium Development Goals-MDGs*) dimana salah satu pointnya adalah pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya masalah kemiskinan untuk diatasi sehingga taraf kehidupan rakyat menjadi lebih berkualitas.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah multi dimensi yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 2006). Besarnya ukuran standar minimum tersebut relatif, menurut pendekatan mana yang digunakan. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan (BPS, 1994). Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. Sementara itu, UNDP dalam laporannya pada *Human Development Report* tahun 1997, memperkenalkan suatu indikator kemiskinan yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Kriteria yang digunakan sebagai tolok ukur kemiskinan antara lain: (1) kehidupan; (2) pendidikan dasar; (3) ketetapan ekonomi.

Proses pembangunan memerlukan *Gross National Product (GNP)* yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dibanyak negara merupakan syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baik pun menjadi tidak berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya.

Bagi Indonesia, sebagai suatu negara yang sedang berkembang, masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting dalam upaya

pembangunan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin, atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2009, mencapai angka 32,5 juta jiwa, atau 14,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia (lihat tabel 1). Angka ini, menunjukkan masih tingginya tingkat kemiskinan di negara Indonesia.

Tabel 1  
Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  
(1976-2010)

Tahun	Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi
	%	Juta	%
1976	40,1	54,2	6,7
1978	33,3	47,2	6,8
1980	28,6	42,3	9,9
1984	21,6	35	7,0
1987	17,4	30	4,9
1990	15,1	27,2	7,2
1993	13,7	25,9	6,5
1996	17,7	34,5	7,8
1998	24,2	49,5	-13,1
1999	23,4	48	0,8
2000	18,9	37,3	4,9
2002	18,2	38,4	4,3
2003	17,4	37,4	4,5
2004	16,7	36,1	5,1
2006	17,8	39,3	5,2
2008	15,4	34,9	6,4
2009	14,2	32,5	6,1

Sumber : Statistik Indonesia 2010

Sebelum krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, Indonesia membuat kemajuan besar dalam mengentaskan kemiskinan di ukur dari tingkat konsumsi. Jika pada tahun 1976 persentase penduduk miskin mencapai 40,1% dari total penduduk, maka pada tahun 1996 menurun menjadi 17,7% dengan pola penurunan yang cenderung sistematis. Namun krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menunjukkan betapa rentannya kemajuan tersebut. Jumlah penduduk miskin kembali meningkat tajam dan berjuta penduduk kembali jatuh ke jurang kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan berkelanjutan juga memberi suatu kontribusi yang besar terhadap pengurangan kemiskinan (yang diukur dari jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan) pada periode 1976-2009. Seperti yang ditunjukkan oleh Statistik Indonesia pada tabel 1., jumlah penduduk miskin menurun dari 54,2 juta orang hingga menjadi 25,9 juta pada periode 1976-1993. Namun kembali naik hingga mencapai 49,5 juta orang pada tahun 1998, akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun tersebut. Jumlah penduduk miskin cenderung terus menurun pada periode 2000-2009, kecuali tahun

2006 meningkat menjadi 39,3 juta orang. Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin menjadi 32,5 juta orang, namun angka ini masih lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 1993.

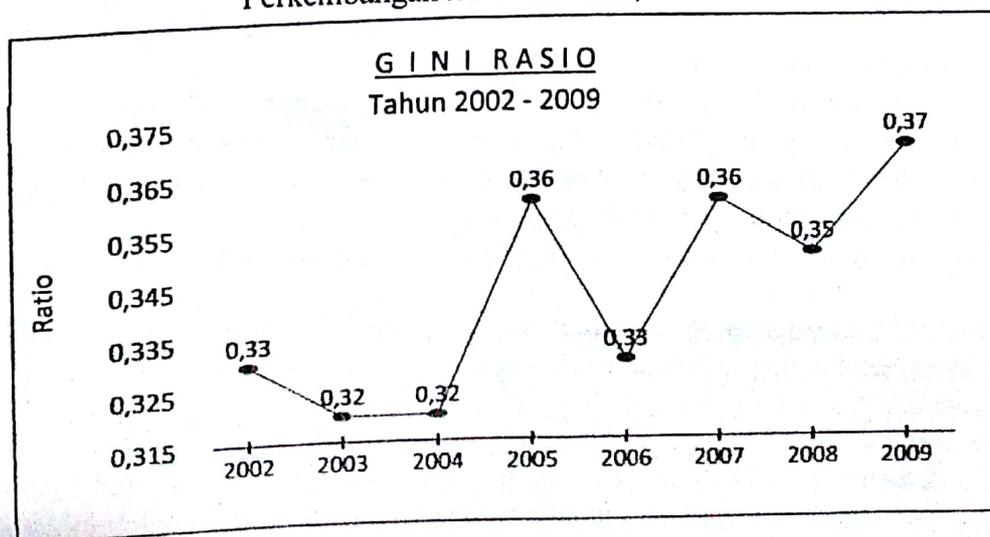
Menjelang pertengahan 1997, beberapa saat sebelum krisis ekonomi muncul, tingkat pendapatan perkapita di Indonesia sudah melebihi 1000 dolar AS, dan tingkat ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan 30 tahun yang lalu. Namun, apa artinya kalau hanya 10 % saja dari jumlah penduduk di tanah air yang menikmati 90 % dari jumlah pendapatan nasional. Sedangkan, sisanya (90 %) hanya menikmati 10 % dari pendapatan nasional. Atau, kenaikan pendapatan nasional selama masa itu hanya dinikmati oleh kelompok 10 % tersebut, sedangkan pendapatan dari kelompok masyarakat yang mewakili 90 % dari jumlah penduduk tidak mengalami perbaikan yang berarti.

Dengan mengikutsertakan pola distribusi pendapatan sebagai suatu variabel yang juga harus diamati perkembangannya selama proses pembangunan berjalan, maka pembangunan ekonomi di Indonesia selama itu dapat dikatakan berhasil apabila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil (Tambunan, 2009).

Selama beberapa dasawarsa (Orde Baru), Indonesia mencatat laju pertumbuhan rata-rata 6% - 7% per tahun, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu mencapai laju pertumbuhan yang relatif tinggi. Namun ternyata pertumbuhan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perbaikan distribusi pendapatan. Pola ketimpangan di Indonesia tidak banyak mengalami penurunan. Kalau Gini Ratio dijadikan indikator ketimpangan yang dominan, maka selama 30 tahun, Gini Ratio Indonesia tidak mengalami perubahan berarti. Pada tahun 1969, Gini Ratio mencatat angka sebesar 0,34, kemudian meningkat menjadi 0,38, pada tahun 1979, dan sedikit menurun menjadi 0,33 pada tahun 2002 (BPS, 2003). Gambaran ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan mencatat angka yang relatif tinggi, setidaknya sampai dengan pertengahan tahun 1997 (sebelum krisis ekonomi), namun distribusi pendapatan cenderung tidak mengalami perubahan secara signifikan.

Perkembangan tingkat distribusi pendapatan di Indonesia selama periode tahun 2002 - 2009 dapat dilihat pada gambar 1. dibawah ini. Pada periode ini tingkat pertumbuhan Indonesia mengalami peningkatan mulai dari 4,3% pada tahun 2002 hingga mencapai 6,1% pada tahun 2009 (lihat tabel 1.). Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diiringi dengan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Pada gambar 1. memperlihatkan bahwa koefisien Gini cenderung mengalami peningkatan yaitu 0,32 pada tahun 2003 hingga mencapai 0,37 pada tahun 2009.

Gambar 1.  
Perkembangan koefisien Gini, 2002-2009



Sumber: BPS

Dari data yang diungkapkan diatas, setidaknya menunjukkan bahwa untuk kasus Indonesia, pertumbuhan nampak berjalan secara paralel dengan penurunan kemiskinan. Artinya, kemiskinan akan menurun ketika pertumbuhan semakin meningkat. Namun tidak demikian halnya dengan ketimpangan. Nampak jelas bahwa pertumbuhan tidak cukup signifikan memperbaiki ketimpangan. Hal ini agak berbeda dengan temuan sejumlah studi empiris misalnya Ravallion (1997), Bourguignon (2004) dan Lopez (2004), bahwa pertumbuhan hanya mempunyai dampak terhadap penurunan kemiskinan jika terjadi perubahan distribusi pendapatan secara progresif.

Debat mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), ketimpangan (*inequality*), dan kemiskinan (*poverty*) terus berlangsung lebih dari empat dekade terakhir. Pertanyaan yang kerap kali memicu debat, antara lain: betulkah pertumbuhan ekonomi sanggup memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan dan mereduksi kemiskinan; apakah pertumbuhan ekonomi dapat memberi manfaat secara luas bagi seluruh kelompok dalam masyarakat, termasuk kelompok miskin; adakah korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan taraf hidup masyarakat; apakah terjadi *trade-off* antara strategi yang pro-pertumbuhan (*pro-growth*) dengan pro-kemiskinan (*pro-poor*); apakah kebijakan yang pro-pertumbuhan juga dapat diharapkan menjadi kebijakan terbaik bagi pengurangan kemiskinan; dan seterusnya.

Fakta menarik yang diungkapkan oleh Bank Dunia dalam World Development Report 2003, telah memicu debat menjadi kian ekstensif. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa di berbagai belahan dunia, sejumlah negara telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan dan bahkan berlangsung secara konsisten dalam satu-dua dekade. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata tidak serta merta mereduksi kemiskinan. Kesenjangan distribusi pendapatan bahkan tetap tak terkoreksi. Disebutkan bahwa sedikitnya 3 (tiga) milyar penduduk bumi masih berada dalam kemiskinan (hanya memperoleh pendapatan kurang dari US\$ 2 per hari). Oleh beberapa kalangan, fakta ini setidaknya dimaknai sebagai bentuk divergensi antara pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan taraf hidup dan distribusi pendapatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

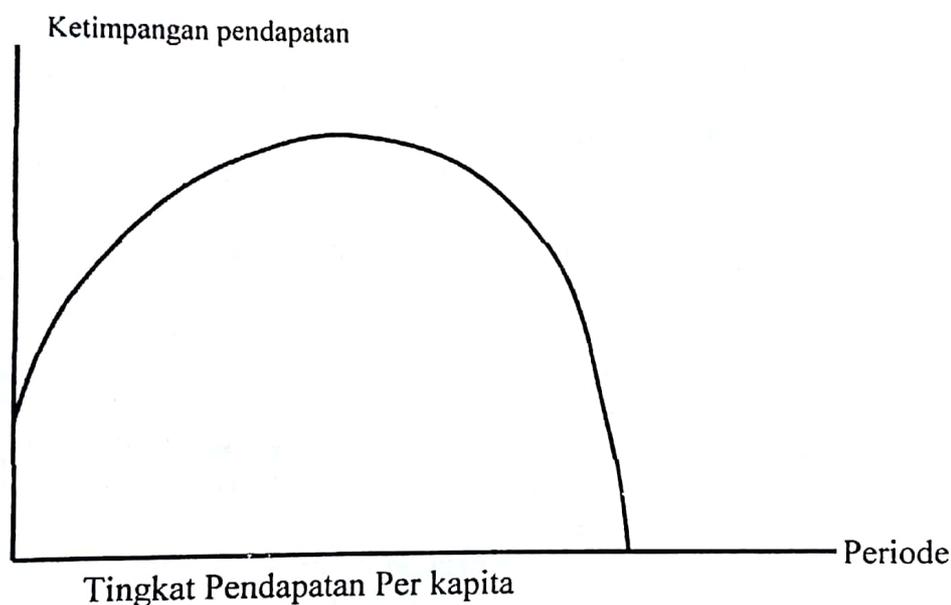
Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Banyak faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

Masalah ketimpangan pendapatan, yang sering disebut pula kesenjangan, baik itu antar individu, antar rumah tangga, antar kelompok, antar daerah maupun antar sektor, merupakan masalah yang selalu ada di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Tidak mungkin dalam suatu negara itu semua pendapatan penduduknya sama besar. Ketimpangan itu terjadi akibat adanya perbedaan umur, pendidikan, lapangan pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya.

Meskipun ketimpangan pendapatan itu tidak dapat dihindari, bukan berarti hal tersebut boleh dibiarkan terus menerus tinggi. Ketimpangan yang tinggi bisa membawa dampak buruk terhadap kestabilan ekonomi dan kestabilan politik. Sebab itu perlu diupayakan ketimpangan yang terjadi jangan terlalu menyolok, atau perkembangan ketimpangan sedapat mungkin jangan sampai membesar. Akan tetapi, usaha untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi ketimpangan pendapatan dalam suatu proses pembangunan ekonomi sangatlah sulit. Terutama

disebabkan karena adanya *trade off* antara ketimpangan pendapatan dengan laju pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang disebutkan dalam *Kuznets Hypothesis*. Dikatakan dalam hipotesis ini bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Artinya dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan, namun dalam jangka panjang peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Fenomena ini dikenal dengan nama Kurva U terbalik dari Hipotesis Kuznets, lihat Gambar 2.

Sejak periode 1970-an hingga sekarang sudah banyak studi empiris yang mencoba menguji hipotesis Kuznets ini. Sebagian ada yang menerima hipotesis tersebut, dan sebagian lagi ada yang menolak. Lebih lanjut lagi, masalah pro dan kontra mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dapat kita temukan pula dalam perdebatan yang membenarkan adanya ketimpangan pendapatan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, dan ada juga yang menyalahkannya (Todaro,2006).



Hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan, merupakan sebuah hipotesis yang dikemukakan oleh Kuznets (1955) (dikenal dengan Kuznets Hypothesis) yang menyatakan bahwa keterkaitan antara pertumbuhan dan ketimpangan seperti U-shaped terbalik: pada tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung buruk dan tidak akan meningkat sampai negara tersebut mencapai status berpendapatan menengah (*middle-income*). Namun sesudah fase tersebut, distribusi pendapatan akan terus membaik atau ketimpangan akan terus menurun.

## HASIL EMPIRIS DAN PEMBAHASAN

Studi-studi empiris yang membuktikan adanya suatu relasi negatif (*trade-off*) yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan adalah dari Deininger dan Squire (1995-1996). Studi mereka ini yang juga memakai data lintas Negara sangat menarik karena tidak menemukan suatu keterkaitan yang sistematis walaupun relasi antara pertumbuhan PDB dan pengurangan kemiskinan positif. Lainnya, misalnya hasil penelitian dari Ravallion dan Chen (1997) yang menggunakan data dari survei-survei pendapatan/pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) di 67 NSB dan Negara-negara transisi untuk periode 1981-1994 juga menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan hampir selalu berbarengan dengan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita atau standar kehidupan, dan sebaliknya kemiskinan bertambah dengan kontraksi ekonomi. Hasil *plot* antara perubahan laju

kemiskinan (dalam log) dengan rata-rata atau nilai tengah dari pengeluaran konsumsi atau pendapatan antarsurvei menunjukkan suatu tren yang negatif. Studi yang dilakukan oleh Wodon (1999) dengan memakai data panel regional untuk kasus Bangladesh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan.

Dalam upaya merumuskan hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan, dan ketimpangan, salah satu kajian yang dilakukan oleh Ravallion (1997), menyatakan bahwa perubahan pada ketimpangan mempunyai dampak pada kemiskinan melalui dua cara. Cara pertama adalah melalui hubungan ketimpangan dan pertumbuhan dan hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan. Tingginya ketimpangan awal menghalangi pertumbuhan, yang pada gilirannya mengurangi tingkat penanggulangan kemiskinan.

Cara kedua adalah argument "elastisitas-pertumbuhan". Argument ini menyatakan bahwa dalam proses pertumbuhan bila semua tingkat pendapatan secara umum meningkat dengan tingkat yang sama, maka ketimpangan yang lebih besar akan membuat kaum miskin hanya memperoleh proporsi hasil pembangunan yang lebih sedikit. Hal ini berarti bahwa masyarakat miskin akan terus mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pendapatan total dan dari hasil peningkatannya melalui pertumbuhan, juga berarti semakin rendahnya tingkat penurunan kemiskinan. Namun pada sisi lain, hal ini juga berarti bahwa masyarakat miskin secara proporsional tidak akan banyak menerima dampak dari suatu keadaan kontraksi ekonomi. Dengan demikian, tinggi rendahnya ketimpangan mempunyai manfaat dan kerugian sendiri bagi masyarakat miskin.

Saat ini, kebanyakan para ekonom berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai dampak besar terhadap perbaikan ketimpangan, karena distribusi pendapatan secara umum tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Menurut Deininger dan Squire (1996), Gross Domestic Product (GDP) per kapita meningkat 26% di negara-negara berkembang antara tahun 1985-1995, namun koefisien Gini hanya berubah 0,28% per tahun selama periode tersebut. Sebagai misal, di Taiwan pendapatan per kapita riil meningkat lima kali lipat antara tahun 1964-1990, akan tetapi koefisien Gini hanya mengalami penurunan yang relatif kecil, yaitu dari 32,2 ke 30,1.

Hasil studi Ravallion dan Chen (1997) terhadap 67 negara berkembang dan transisi, cenderung mendukung temuan Deininger dan Squire (1996). Dengan menggunakan data survey rumah tangga selama periode 1981-1994, ia menemukan bahwa perubahan ketimpangan tidak memiliki kaitan dengan perubahan standar hidup rata-rata. Bahkan pertumbuhan seringkali justru memperburuk distribusi pendapatan.

Apa yang diungkapkan oleh Bank Dunia dalam World Development Indicators 1998 (dikutip dalam Todaro, 2003), sebagian cenderung mendukung temuan di atas. Dalam laporan tersebut nampak agak sulit untuk menarik kesimpulan apakah pertumbuhan ekonomi dapat memperbaiki distribusi pendapatan, setidaknya dalam kurun waktu lebih dari tiga dekade (1965-1996). Di Amerika Latin dan di Afrika misalnya, pertumbuhan nampak berjalan beriringan dengan perbaikan distribusi pendapatan: pertumbuhan nampak meningkat dan koefisien Gini cenderung menurun. Namun, gambaran tersebut tidak berlangsung di Asia Timur. Meskipun pertumbuhan di Asia Timur nampak mengalami peningkatan yang amat signifikan (rata-rata di atas 5% per tahun), akan tetapi ketimpangan justru kian membesar (ditunjukkan oleh koefisien Gini yang semakin meningkat).

Namun, studi yang dilakukan oleh Ravallion dan Datt (2000) di India justru menunjukkan hasil yang agak berbeda. Dengan menggunakan logaritma (log) produk domestik riil per kapita sebagai proksi dari pendapatan per kapita dan indeks Gini dari konsumsi per orang (dalam persen) sebagai proksi dari tingkat ketimpangan, mereka menunjukkan bahwa selama periode 1950-an hingga 1990-an, pendapatan rata-rata per kapita meningkat dan tingkat ketimpangan memperlihatkan trend yang menurun.

Sebuah analisis lengkap yang dilakukan oleh Banerjee dan Duflo (2001), juga menemukan adanya hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan di banyak negara.

meskipun bersifat non-linear. Chen (2003) dengan menggunakan data lintas negara, juga menemukan terjadinya *U-shaped* terbalik hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan dalam jangka panjang, meskipun tidak dalam jangka pendek.

Untuk kasus Indonesia, hasil studi Deininger dan Squire (1996) yang menyajikan estimasi koefisien Gini dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, juga menarik untuk diamati. Secara parsial, hasil studi tersebut memberi indikasi bahwa hipotesis *U-shaped* terbalik dari Kuznets berlaku untuk kasus Indonesia. Pada tahun 1970-an misalnya, tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia relatif rendah (0,31), tahun 1980-an tinggi (0,36), dan kemudian tahun 1990-an kembali rendah (0,32); padahal laju pertumbuhan meningkat secara konsisten selama periode tersebut.

Berbagai fakta empiris di atas menunjukkan bahwa pada beberapa kasus, memang kerap kali pertumbuhan dan perbaikan distribusi pendapatan bergandengan tangan. Namun pada sejumlah kasus lainnya, tidaklah demikian. Divergensi yang besar antara pertumbuhan dan perbaikan distribusi pendapatan timbul bila pertumbuhan bersifat *volatile* dan tidak berkesinambungan.

Ada teori yang mengatakan ada *trade off* antara ketimpangan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketimpangan di negara sedang berkembang dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah. Di banyak negara sedang berkembang tidak ada *trade off* antara pertumbuhan dan ketimpangan. Yang jelas, ada berbagai cara pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Diskusi ada tidaknya *trade off* antara pertumbuhan dengan ketimpangan, menurut Field (1990), tergantung jenis data yang digunakan apakah silang tempat (*cross section*), runtut waktu (*time series*), ataukah menggunakan data mikro.

## KESIMPULAN

Ada pertentangan di lingkungan akademisi mengenai hubungan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Sejumlah studi yang menggunakan data *cross section* mengukuhkan hipotesis-U terbalik dan mengilustrasikan bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah ternyata ketimpangan berkorelasi negatif dengan pertumbuhan. Sebaliknya beberapa studi yang menggunakan data *time series* meragukan hipotesis-U terbalik. Diskusi ada tidaknya *trade off* antara pertumbuhan dengan ketimpangan, tergantung jenis data yang digunakan apakah silang tempat (*cross section*), runtut waktu (*time series*), ataukah menggunakan data mikro. Keterkaitan antara pertumbuhan ketimpangan dan kemiskinan masih terus menjadi perdebatan, dan masih menjadi perhatian untuk dijadikan kajian-kajian ilmiah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Benerjee, A. and E. Duflo, 2001. Inequality and Growth: What Can the Data Say?, Paper presented at the WIDER Conference on Growth and Poverty, Helsinki, 25-26 May.
- Biro Pusat Statistik (BPS). 1994. *Penduduk Miskin dan Desa Tertinggal 1993: Metodologi dan Analisa*. Jakarta.
- Bourguignon, Francois, 2004. *Poverty-Growth-Inequality Triangle*, Paper was presented at the Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi, on February 4, 2004.
- Deininger, Klaus and Lyn Squire, 1996. A New Data Set Measuring Income Inequality, *World Bank Economic Review* 10(3): 565-91.

- Field, Gary S., 1990. Income Distribution and Economic Growth, dalam Gustav Ranis dan Paul Schulz(eds.), *The State of Development Economics: Progress and Perspective*, Basil Blackwell, Oxford.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan; Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kuznets, Simon, 1955. Economic Growth and Income Inequality, *American Economic Review* 45(1): 1-28, March.
- Lopez, J. Humberto. 2004. Pro Poor: Is There a Tradeoff?. *Policy Research Working Paper#3378*. World Bank.
- Ravallion, M. And G. Datt. 2000. When Growth is Pro Poor? Evidence from the Diverse Experience of Indian States. Policy Working Paper#2263. World Bank. Retrieved October 15, 2011 from <http://rru.worldbank.org/PaperLinks/Economic-Growth-Poverty-Alleviation/>
- Ravallion, M and S. Chen, 1997. What Can New Survey Data Tell us about Recent Changes in Distribution and Poverty?, *The World Bank Economic Review* 11: 357-382.
- Tambunan, Tulus. 2009. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith, 2003. *Economic Development*, Eighth Edition, The Addison-Wesley.
- Wodon, Quentin T., 1999. Growth, Poverty, and Inequality: A Regional Panel for Bangladesh, The World Bank, *Policy Research Working Paper #2070*, March.